

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan sulit untuk dituntaskan meskipun sudah banyak realisasi kebijakan. Sebab penanggulangan kemiskinan bukan hanya bersinggungan soal rendahnya angka pendapatan namun juga buruknya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta sulitnya realisasi dalam pembangunan dan permasalahan sosial. Banyak kriteria kemiskinan yang digunakan, mulai dari pendapatan, kondisi perumahan, pengeluaran bahkan menggunakan kombinasi berbagai aspek kehidupan yang disebut juga dengan kemiskinan multidimensi. Sedangkan di Indonesia, kriteria kemiskinan yang digunakan adalah pengeluaran per kapita, yaitu konversi kebutuhan pangan yang dikonsumsi atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan minuman. Karena pada saat pengeluaran per kapita bulanan masyarakat di bawah garis kemiskinan maka mereka tergolong miskin.

Menurut Bank Dunia (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan serta tingkat kesehatan dan pendidikan juga rendah. Selain itu, kemiskinan sering terjadi oleh karena terbatasnya kesempatan kerja dan seringkali

masyarakat yang tergolong miskin adalah orang yang pengangguran serta tingkat pendidikan dan kesehatannya yang buruk. Secara harfiah pendapatan dan kekurangan uang adalah akar masalah kemiskinan dan indikator yang dapat menentukan kesejahteraan seseorang terutama kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam hal kebutuhan pokok.



Sumber : BPS Sumut (data diolah 2024)

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Di Daerah Pesisir Pantai Timur Sumatera Utara Tahun 2013-2022

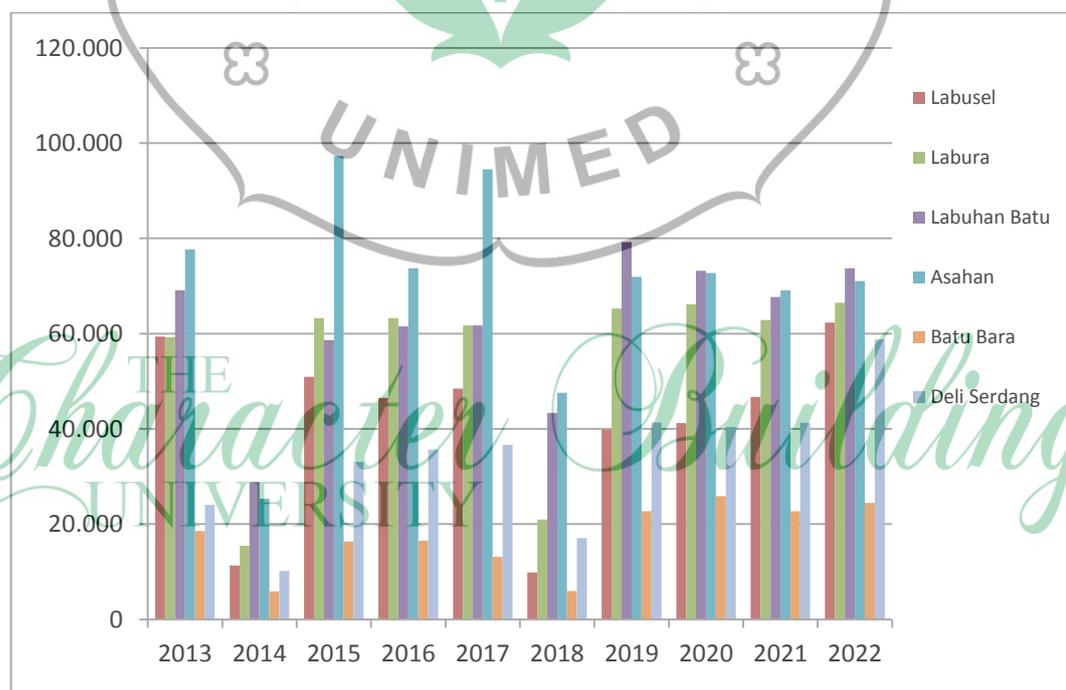
Berdasarkan grafik di atas (gambar 1.1), terdapat tingkat kondisi kemiskinan di wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara yang mengalami fluktuatif. Namun jika dibandingkan pada tahun 2013 dan 2022 melalui data tersebut, masalah kemiskinan justru meningkat dan tetap menjadi masalah yang serius di wilayah kabupaten Labuhan Batu dan kabupaten Batu Bara. Wilayah Labuhan Batu

meningkat sebesar 5.13% dan wilayah Batu Bara sebesar 2.53%. Sementara untuk daerah yang mengalami penurunan ditahun 2022 adalah kabupaten Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara jika dibandingkan kondisi ditahun 2013. Disisi lain, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah kabupaten Deli Serdang sebanyak 85,28 ribu jiwa.

Ragnar Nurkse dalam (Arsyad, 2010) menjelaskan tentang fenomena lingkaran setan kemiskinan yang menjerat penduduk dinegara-negara yang miskin. Ditelusuri bahwa lemahnya tingkat pendapatan rill menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan lemahnya kapasitas modal, ketertinggalan sumber daya manusia (SDM), SDA yang kurang dimanfaatkan yang berdampak pada rendahnya produktivitas sehingga tingkat pendapatan juga rendah. Wilayah pedesaan sangat rentan mengalami fenomena lingkaran setan kemiskinan ini. Kepemilikan modal dan sumber daya menjadi isu paling utama ketika membahas kemiskinan di wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara yang merupakan wilayah sentra perkebunan dengan potensi kelapa sawit yang cukup besar. Modal tersebut bukan hanya bersinggungan soal alat dan teknologi, lebih dari pada itu, diantaranya *human capital*, modal material dan Sumber Daya Alam.

Selain itu, teori yang dikembangkan *Solow* dan *Swan* (kurniawan 2015) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatnya pertumbuhan ekonomi diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan daerah, salah satunya adalah tenaga kerja. Artinya jika meningkatnya tenaga kerja akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas yang akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Teori ini kemudian didukung oleh penelitian Rina Trisna (2015) yang menjelaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit menjadi sektor potensial di Kabupaten Selume yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Namun teori ini bertentangan dengan asumsi oleh Artur Lewis (Todaro, 2011) dalam perekonomian tradisional. Perekonomian tradisional umumnya terdapat pada daerah pedesaan dimana tingkat produktivitasnya masih rendah dibandingkan perekonomian Modern. Ditandai dengan nilai produk *Marginal* dari tenaga kerja bernilai nol, artinya fungsi produksi pada sektor pertanian Law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel (tenaga kerja) justru akan menurunkan total produksi.



Sumber : BPS Sumut (data diolah 2024)

Gambar 1.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Di Daerah Pesisir Pantai Timur Sumatera Utara Tahun 2013-2022

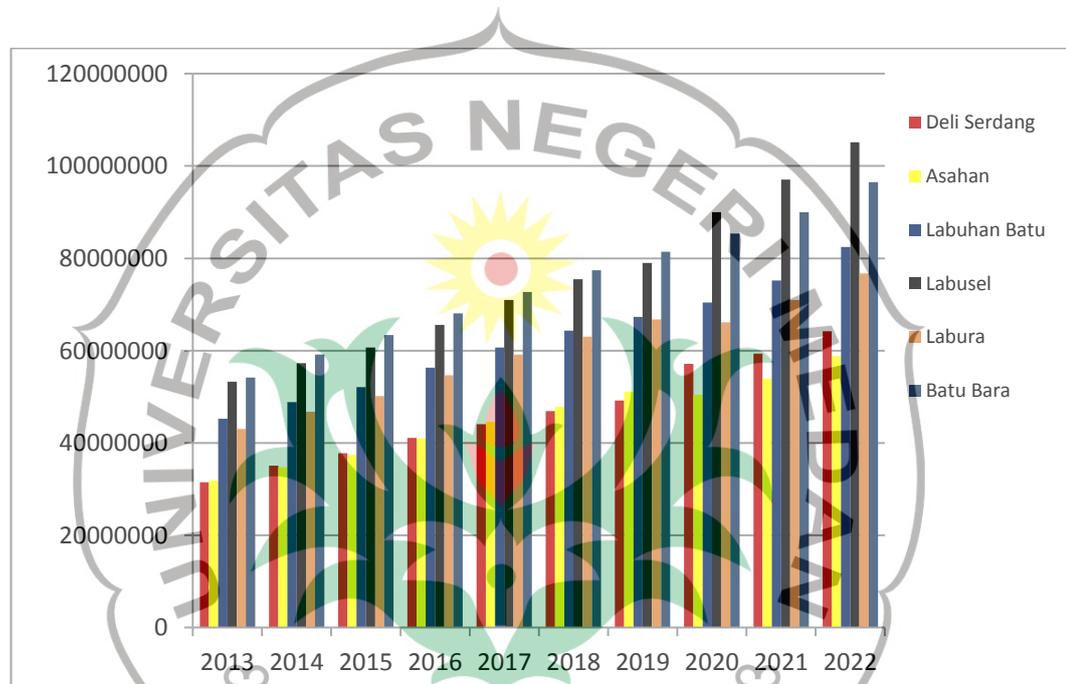
Di Sumatera Utara khususnya wilayah pesisir pantai timur adalah wilayah sentra lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak lagi dijadikan sebagai usaha sampingan melainkan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya. Perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang signifikan bukan hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan mempercepat pembangunan di wilayah tertentu, terutama di Sumatera Utara. Terdapat berbagai bukti bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit bisa meningkatkan pendapatan di kawasan pedesaan, seperti memberikan pekerjaan tetap dan menggerakkan kegiatan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja buruh untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Karena penyerapan tenaga kerja juga memberikan peluang bagi penduduk dan masyarakat yang sebelumnya menganggur akan memperoleh pekerjaan dan penghasilan.

Dapat dilihat melalui grafik diatas (gambar 1.2) menunjukkan bahwa Tingkat produktivitas tenaga kerja perkebunan kelapa sawit mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Jika dibandingkan tren kondisi pada tahun 2013 dan 2022, produktivitas mengalami peningkatan. Tentunya faktor tenaga kerja dan luas lahan yang tinggi akan berbanding lurus dengan banyaknya output yang dihasilkan. Jika dicermati kembali bahwa fenomena penurunan produktivitas tenaga kerja perkebunan menurun drastis pada tahun 2014 dan 2018 disepanjang wilayah pantai Timur Sumatera Utara. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah anomali iklim. Berdasarkan literasi pertanian kementerian pertanian, masalah iklim ini adalah pergeseran musim dari rata-rata normalnya. Karena dampak perubahan iklim tentunya juga akan menjadi ancaman. Menurut

penelitian Edwards (2019) dalam laporan PASPI, laju pengentasan kemiskinan di kabupaten yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terbesar (sentra sawit) lebih cepat ketimbang kabupaten yang tidak mempunyai perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha sehingga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin pedesaan. Pendapatan produsen kelapa sawit bisa 5 hingga 10 kali lebih tinggi dibandingkan pendapatan produsen non-sawit.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk atau daerah dan antar sektor. Kemiskinan akan selalu disandingkan dengan besarnya pendapatan. Pendapatan masyarakat disuatu wilayah dapat diukur melalui pendapatan per kapita (Michael P. Todaro, 2012). Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah pada periode tertentu yang dihitung melalui pendapatan periode tertentu dibagi dengan jumlah populasi di wilayah tersebut (Sukirno, 2016). Selain itu, pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan karena semakin tinggi pendapatan akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya. Berbicara soal kesejahteraan, korelasi positif terjadi antara kesejahteraan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang. Karena pendapatan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama bahan pokok. Sesuai dengan ukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang yang dikatakan miskin pada saat pengeluaran per kapita bulanan masyarakat masih dibawah garis

kemiskinan. Oleh karena itu PDRB per orang sebuah wilayah mencerminkan tingkat pendapatan rata-rata penduduknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Sumber : BPS Sumut (data diolah 2024)

Gambar 1.3 Kondisi PDRB Per Kapita Daerah Pesisir Pantai Timur Sumatera Utara Tahun 2013-2022

Gambar 1.3 diatas menunjukkan tingkat pendapatan perkapita wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara secara keseluruhan yang berangsur-angsur naik setiap tahunnya atau grafik PDRB per kapita dengan tren meningkat. Jika dibandingkan tren peningkatannya pada tahun 2013 dengan tahun 2022 sangat drastis. Wilayah kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 dengan pendapatan sebesar Rp. 64.185.926, kabupaten Asahan sebesar Rp. 58.871.738, kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 82.480.120, dan wilayah kabupaten yang memiliki tingkat PDRB per kapita tertinggi di tahun 2022 adalah Labuhanbatu selatan, sebesar Rp. 105.126.350, dibandingkan wilayah lainnya Labuhan batu dengan

pendapatan Rp. 76.695.035 dan Batu Bara menempati posisi tertinggi setelah Labuhan Batu Selatan yaitu sebesar Rp. 96.493.002. Pendapatan menjadi salah satu faktor dan ukuran yang menentukan tingkat kemiskinan. Sehingga data pendapatan yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya memiliki korelasi negatif terhadap kemiskinan. Artinya pendapatan yang meningkat akan diikuti dengan penurunan jumlah angka penduduk miskin. Hal ini didukung melalui penelitian Yunie Rahayu (2018) dan Ridzky Giovanni (2018) menemukan bahwa PDRB per kapita menunjukkan korelasi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan data-data empiris diatas untuk memerangi kemiskinan, di daerah pantai timur Sumatera Utara sebagai wilayah sentra perkebunan penghasil kelapa sawit diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan wilayahnya, melalui pendapatan masyarakatnya yang menjadi sektor dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.. Oleh sebab itu, studi ini penting untuk menjawab apakah produktivitas tenaga kerja perkebunan kelapa sawit serta PDRB/pendapatannya mampu mengatasi masalah kemiskinan khususnya di daerah pesisir pantai Timur Sumatra Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi yang mencakup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Angka jumlah penduduk miskin daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara mengalami peningkatan di tahun 2022 di wilayah Kabupaten Labuhan Batu dan Batu Bara.
2. Tingkat Produktivitas tenaga kerja perkebunan kelapa sawit terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2014 dan tahun 2018 di seluruh wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian, sehingga batasan masalah dalam penelitian ini terkait dengan :

1. Sumber data dalam penelitian ini hanya diperoleh dari lembaga statistik dalam periode 10 (sepuluh) tahun dari 2013 hingga 2022.
2. Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sampel dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) wilayah kabupaten pesisir pantai Timur yaitu, Kabupaten Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, dan Batu Bara.
3. Penelitian menggunakan variabel Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) dengan data jumlah tenaga kerja perkebunan dibagi dengan hasil produksi (ton) kelapa sawit, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan data PDRB Per Kapita serta kemiskinan dengan data jumlah penduduk miskin.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah terkait topik yang akan dibahas dalam tulisan skripsi penulis, adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit terhadap kemiskinan di daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara.
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara
3. Bagaimana pengaruh Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit terhadap dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap kemiskinan di daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit terhadap kemiskinan di daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dan PDRB Per Kapita Terhadap kemiskinan di daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan mendapatkan manfaat diantaranya :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tujuan yang diharapkan adalah untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, pemikiran, wawasan, ide, dan informasi kepada individu lain yang tertarik, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi dalam bidang Ekonomi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Peneliti

Dapat memberikan atau wawasan yang lebih terbuka dan juga pengetahuan kepada peneliti berkaitan dengan produktivitas perkebunan dan PDRB terhadap kemiskinan.

2. Untuk Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan referensi guna menambah wawasan, dan dapat dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat yang membutuhkan penelitian ini.

3. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah informasi juga pertimbangan yang berguna untuk melihat aktivitas, kondisi ekonomi terkait kemiskinan di daerah pesisir pantai Timur Sumut.